

The Deadlock Diplomatic: Alasan Diplomasi Tidak Pernah Membawa Palestina ke Gerbang Kemerdekaan

Maulida Putri Awaliyah
Universitas Indonesia

e-mail: awaliyahmaulidaputri@gmail.com

ABSTRACT

For over seven decades, Palestine's struggle for independence has been dominated by diplomatic approaches through bilateral negotiations, United Nations resolutions, and symbolic recognitions by various countries. However, to this day, the Palestinian statehood remains uncertain, lacking full sovereignty and control over its own territory. This study explores in greater depth the failure of diplomacy in achieving true independence for Palestine. Using a qualitative approach and historical analysis of key moments such as the Oslo Accords, UN resolutions, and the trend of Israel-Arab normalization, this paper demonstrates how diplomacy often reinforces the status quo and benefits the occupying power more than the oppressed. In addition, this research evaluates the shifts in Palestinian strategy following diplomatic failures and compares them with forms of resistance pursued in the past. The main findings suggest that international diplomacy, when not accompanied by political pressure and real power, tends to be symbolic and ineffective in dismantling modern colonial structures. The conclusion argues that Palestinian independence is unlikely to be achieved through diplomacy alone and requires a more confrontational strategic approach toward the ongoing system of oppression.

Keywords: *palestine, diplomacy, independence*

ABSTRAK

Selama lebih dari tujuh dekade, perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan didominasi oleh pendekatan diplomatik melalui perundingan bilateral, resolusi PBB, dan pengakuan simbolik dari berbagai negara. Namun hingga kini, status kenegaraan Palestina tetap berada dalam ketidakpastian, tanpa kedaulatan penuh maupun kendali atas wilayahnya sendiri. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang kegagalan jalur diplomasi dalam mewujudkan kemerdekaan sejati bagi Palestina. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis historis terhadap momen-momen penting seperti Kesepakatan Oslo, resolusi-resolusi PBB, serta tren normalisasi hubungan Israel-Arab, kajian ini menunjukkan bagaimana diplomasi kerap memperkuat status quo dan lebih menguntungkan pihak penjajah. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi pergeseran strategi Palestina pasca kegagalan diplomatik serta membandingkannya dengan pola perjuangan yang pernah ditempuh Palestina pada masa silam. Temuan utama menunjukkan bahwa diplomasi internasional, tanpa disertai tekanan politik dan kekuatan nyata, cenderung bersifat simbolik dan tidak efektif meruntuhkan struktur kolonialisme modern. Kemerdekaan Palestina tidak mungkin dicapai melalui diplomasi semata, dibutuhkan pendekatan strategis yang lebih konfrontatif terhadap sistem penindasan yang terus berlangsung.

Kata kunci: Palestina, diplomasi, kemerdekaan

1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Perjuangan kemerdekaan Palestina telah berlangsung lebih dari tujuh dekade sejak berdirinya Israel pada tahun 1948. Berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, mulai dari penerapan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pelaksanaan perundingan bilateral seperti Oslo Accords pada tahun 1993, hingga usaha memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional. Melalui langkah-langkah ini, diplomasi dipandang sebagai sarana damai yang diharapkan mampu mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat (Khalidi, 2013).

Namun, hingga saat ini berbagai inisiatif tersebut belum menghasilkan kedaulatan yang substantif bagi Palestina. Secara formal, Palestina telah memperoleh pengakuan dari lebih dari 130 negara dan sejak tahun 2012 memiliki status non-member observer state di Perserikatan Bangsa-Bangsa (Alzaky, 2017). Meskipun demikian, secara de facto kemandirian politik dan teritorialnya belum terwujud. Israel masih mempertahankan kontrol atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta seluruh akses perbatasan dan sumber daya strategis (Bennis, 2018). Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan yang signifikan antara legitimasi diplomatik di tingkat internasional dan realitas kekuasaan di lapangan (Said, 1978).

Kegagalan diplomasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pendekatan damai dalam konteks konflik yang diwarnai ketimpangan kekuasaan. Diplomasi yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai solusi adil justru sering kali menjadi instrumen yang mempertahankan status quo (Pappé, 2014). Lebih jauh, perjanjian tersebut menciptakan ketergantungan administratif dan ekonomi Palestina terhadap Israel (Tamer, 2012).

Selain faktor internal, peran aktor internasional turut memperburuk kondisi diplomasi Palestina. Amerika Serikat sebagai mediator utama sering menunjukkan keberpihakan terhadap Israel (Mearsheimer & Walt, 2007), sementara sejumlah negara Arab mulai menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords (2020), yang secara tidak langsung melemahkan posisi tawar Palestina (Barnett, 2021). PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya pun lebih banyak memberikan pengakuan simbolik tanpa diiringi mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran Israel (Falk, 2020).

Kondisi ini menegaskan bahwa diplomasi, tanpa kekuatan politik dan dukungan strategis yang seimbang, cenderung kehilangan daya dorongnya sebagai instrumen perjuangan kemerdekaan. Maka, pertanyaan yang perlu dikaji secara mendalam adalah mengapa diplomasi yang seharusnya menjadi jalan damai justru gagal membawa kemerdekaan sejati bagi Palestina? Pertanyaan ini menjadi landasan utama bagi penelitian ini untuk menganalisis akar penyebab kegagalan diplomasi, peran aktor-aktor global dalam mempertahankan status quo, serta kemungkinan munculnya strategi alternatif dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT)

Menurut Hans Morgenthau (1948) dalam *Politics Among Nations*, diplomasi berfungsi untuk mengelola kekuasaan dan mencegah konflik terbuka melalui kompromi kepentingan. Diplomasi dalam pandangan realis merupakan alat rasional untuk mempertahankan kepentingan negara dalam sistem internasional yang kompetitif. Kenneth Waltz (1979) memperkuat pandangan ini melalui teori *neorealism*, yang menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, sehingga negara hanya dapat bertahan dengan memperkuat kapabilitasnya sendiri. Dalam konteks konflik Palestina–Israel, pendekatan ini menjelaskan ketidakseimbangan struktural karena Palestina tidak memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang cukup untuk menekan Israel atau memengaruhi keputusan lembaga internasional seperti PBB (Mearsheimer, 2001).

Sementara itu, teori liberal seperti yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (1977) menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan peran institusi internasional dalam mengatur hubungan global. Namun, efektivitas pendekatan liberal dalam kasus Palestina sangat terbatas karena lembaga-lembaga global seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF masih dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat (Ikenberry, 2011). Bahkan, Alexander Wendt (1992) melalui teori *constructivism* menyoroti bahwa identitas dan persepsi internasional terhadap keamanan Israel telah membentuk bias struktural dalam diplomasi Timur Tengah. Dengan demikian, teori-teori Barat secara kolektif menjelaskan bahwa diplomasi Palestina gagal bukan hanya karena kelemahan internal, melainkan karena sistem internasional itu sendiri tidak bersifat netral, melainkan dikuasai oleh kepentingan hegemonik Barat (Said, 1978; Khalidi, 2013).

2.1 Sejarah Kegagalan Diplomasi Palestina

Para pemikir pascakolonial seperti Edward Said (1978) dan Rashid Khalidi (2013) menegaskan bahwa praktik diplomasi internasional pasca-Perang Dunia II tidak bebas nilai, melainkan sarat dengan bias kolonial yang mereproduksi dominasi Barat atas dunia Timur. Dalam perspektif ini, diplomasi dan resolusi perdamaian sering kali berfungsi sebagai instrumen hegemonik untuk mempertahankan struktur ketimpangan global di bawah legitimasi hukum dan moral internasional (Said, 1978; Khalidi, 2013). Pola ini dapat ditelusuri melalui berbagai perjanjian perdamaian yang melibatkan Palestina, mulai dari *Camp David Accords* (1978), *Madrid Conference* (1991), *Oslo Accords* (1993), hingga *Abraham Accords* (2020).

Camp David Accords (1978) merupakan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, dengan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter sebagai mediator. Kesepakatan ini menghasilkan dua kerangka utama, yaitu *Framework for Peace in the Middle East* dan *Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and Israel*, yang menjanjikan bentuk *self-government* bagi rakyat Palestina (Quandt, 1986). Meskipun berhasil menciptakan perdamaian bilateral antara Mesir dan Israel, perjanjian ini gagal menyentuh akar persoalan

Palestina. Dengan hanya menawarkan otonomi sementara tanpa kedaulatan, *Camp David Accords* justru memperkuat pola *deadlock diplomacy* proses negosiasi yang terus berlangsung tanpa menghasilkan keadilan substantif bagi rakyat Palestina (Stein, 1999).

Madrid Conference (1991) membuka jalur negosiasi langsung antara Israel dan negara-negara Arab (Suriah, Lebanon, Yordania, dan perwakilan Palestina) untuk mencapai perdamaian komprehensif di Timur Tengah berdasarkan Resolusi DK PBB 242 dan 338. Namun, konferensi ini tidak membawa perubahan substansial terhadap posisi politik Palestina yang tetap tidak diakui sebagai aktor independen dan harus berpartisipasi di bawah payung Yordania. Tidak ada keputusan konkret yang dihasilkan terkait kedaulatan, batas wilayah, maupun pengakuan atas negara Palestina. Sementara itu, Israel memanfaatkan proses ini untuk mempertahankan *status quo* dan memperluas pemukiman di wilayah pendudukan. Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *illusion of progress*, yaitu kesan semu adanya kemajuan diplomatik padahal tidak menyentuh akar konflik (Journal of Palestine Studies, 1992). Konferensi ini, menurut analisis tersebut, menandai "the institutionalization of process over substance," memperkuat pola *deadlock diplomacy* yang mengutamakan proses daripada hasil nyata.

Oslo Accords merupakan serangkaian perjanjian damai antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1993 (*Oslo I*) dan 1995 (*Oslo II*), yang bertujuan membangun pemerintahan sendiri bagi rakyat Palestina sebagai langkah menuju perdamaian permanen. *Oslo I* melahirkan *Palestinian Authority* sebagai badan pemerintahan sementara dan menjanjikan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza dan Jericho, sedangkan *Oslo II* membagi Tepi Barat ke dalam tiga zona (A, B, dan C) dengan tingkat kontrol berbeda (Shlaim, 1994). Namun, perjanjian ini gagal menyentuh isu-isu krusial seperti Yerusalem, pengungsi, pemukiman ilegal, dan batas kedaulatan, sehingga menjadikan proses perdamaian sekadar formalitas tanpa hasil konkret. Khaled Elgindy (2023) bahkan menilai bahwa *Oslo* mewariskan "a peace process without peace," sementara Ian Lustick (1997) menyebutnya sebagai "institutionalized process without substance," menegaskan bahwa diplomasi lebih diutamakan daripada keadilan substantif.

Camp David II (2000) merupakan upaya lanjutan dari proses perdamaian Oslo yang difasilitasi oleh Presiden AS Bill Clinton dan mempertemukan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dengan Pemimpin PLO Yasser Arafat di Camp David, Maryland. Perundingan ini membahas isu-isu sensitif seperti Yerusalem, batas wilayah, pemukiman, dan hak kembali pengungsi. Israel menawarkan penarikan dari sekitar 90% wilayah Tepi Barat dengan syarat keamanan tertentu serta pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, namun tetap mempertahankan kontrol atas Yerusalem Timur. Arafat menolak tawaran tersebut karena dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan kedaulatan (Ben-Ami, 2006). Kegagalan *Camp David II* memicu *Intifada Kedua* dan menandai berakhirnya fase optimisme Oslo. Menurut Pressman (2003), konferensi ini menunjukkan bahwa diplomasi hanya memperpanjang ilusi penyelesaian konflik tanpa kemauan politik yang nyata.

Road Map for Peace (2003) merupakan inisiatif diplomatik yang disusun oleh *Quartet*

on the Middle East Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB dengan tujuan mewujudkan solusi dua negara melalui tiga fase utama. Namun, pelaksanaannya gagal karena Israel menolak menghentikan pembangunan permukiman dan otoritas Palestina terpecah secara internal. Rencana ini, menurut Nathan J. Brown (2004) dan Rashid Khalidi (2007), lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politik internasional ketimbang mekanisme penyelesaian konflik.

Annapolis Conference (2007) yang diinisiasi Presiden AS George W. Bush bertujuan menghidupkan kembali negosiasi pasca-kegagalan *Road Map for Peace*. Pertemuan ini menghasilkan *Annapolis Joint Understanding* sebagai komitmen pembentukan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara, namun tanpa mekanisme implementasi yang jelas. Menurut Pressman (2008) dan Elgindy (2013), konferensi ini bersifat simbolik dan lebih menunjukkan upaya AS menjaga citra diplomatiknya menjelang akhir masa jabatan Bush.

Abraham Accords (2020) menandai babak baru diplomasi regional yang difasilitasi oleh pemerintahan Donald Trump, melibatkan Israel dan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian ini diklaim sebagai langkah menuju stabilitas kawasan melalui kerja sama ekonomi dan keamanan, namun secara substansial menggeser fokus dari isu Palestina menuju agenda anti-Iran dan integrasi ekonomi (Khalidi, 2021). Palestina tidak dilibatkan sama sekali dan mengecam perjanjian tersebut sebagai bentuk normalisasi pendudukan. Menurut Ian Lustick (2022), *Abraham Accords* menandai pergeseran paradigma dari "peace for land" menjadi "peace for arms and trade," yang menormalkan hubungan tanpa penyelesaian keadilan.

2.2 Diplomasi dalam Perspektif Islam

Diplomasi dalam Islam menunjukkan bahwa hubungan internasional dalam tradisi Islam tidak terpisah dari nilai-nilai moral dan keadilan. Menurut al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (1994), diplomasi merupakan bagian dari *siyasah kharijiyyah* (politik luar negeri) yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan hukum Allah dalam hubungan antarnegara. Ia menekankan bahwa perjanjian damai (*sulh*) atau gencatan senjata (*hudnah*) diperbolehkan selama tidak melegitimasi kezaliman atau mengorbankan kepentingan umat. Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* (2005) menambahkan bahwa kekuasaan politik dan moralitas harus berjalan seimbang; kekuasaan tanpa nilai akan melahirkan tirani, sedangkan nilai tanpa kekuasaan akan kehilangan kemampuan untuk menegakkan keadilan.

Selain itu, praktik diplomasi Islam juga dapat ditelusuri dari periode Nabi Muhammad SAW, terutama melalui *Perjanjian Hudaibiyah* (628 M), yang sering dijadikan rujukan klasik mengenai strategi diplomasi berbasis etika. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya negosiasi dan kompromi taktis untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang tanpa mengorbankan prinsip keadilan (al-Mubarak, 2000). Pendekatan ini kemudian dikembangkan dalam literatur politik Islam klasik maupun modern sebagai model diplomasi yang memadukan dimensi moral, politik, dan kemanusiaan.

Kajian kontemporer memperluas pemahaman ini dalam konteks global modern. Fanani (2022) menjelaskan bahwa diplomasi dalam Islam merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat melalui mekanisme damaimaupun pertahanan aktif. Sementara itu, artikel dalam Jurnal Misykat al-Anwar (2023) menyoroti pentingnya prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam kebijakan politik dan diplomasi, yakni menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dengan demikian, berbagai penelitian menempatkan diplomasi Islam sebagai instrumen politik yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat manusia secara universal.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka penelitian ini mengembangkan dua hipotesis utama:

H1: Diplomasi Palestina yang berlandaskan sistem politik Barat tidak mampu menghasilkan kemerdekaan sejati karena tunduk pada struktur kekuasaan hegemonik dan bias kolonial dalam sistem internasional.

H2: Paradigma Islam yang menekankan prinsip keadilan dan pemeliharaan kemaslahatan (*maqasid al-shariah*) berpotensi menawarkan kerangka perjuangan alternatif yang lebih berkeadilan dalam menjamin kemerdekaan Palestina.

3. METODE PENELITIAN/RESEARCH DESIGN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian berupaya memahami secara mendalam dinamika diplomasi Palestina dalam kerangka politik internasional modern melalui metode konseptual dan historis. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis. Data primer mencakup dokumen resmi perjanjian seperti *Camp David Accords* (1978), *Oslo Accords* (1993 dan 1995), *Road Map for Peace* (2003), *Annapolis Conference* (2007), dan *Abraham Accords* (2020). Sementara data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lembaga internasional yang relevan dengan tema hubungan internasional, teori pascakolonial, serta politik Timur Tengah. Pendekatan ini dipilih untuk memahami hubungan sebab-akibat antara kegagalan diplomasi dan struktur kekuasaan internasional.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan penelitian seperti tidak melibatkan data empiris secara langsung layaknya wawancara dengan pihak diplomatik atau akses terhadap dokumen negara. Cakupan tempo penelitian dibatasi pada periode antara 1948 hingga 2024 yang mencakup masa kolonial hingga era normalisasi pasca-Abraham Accords, sehingga tidak mencakup penelitian terbaru dan penelitian lampau sebelum tahun 1948.

Reliabilitas penelitian ini dijaga melalui seleksi ketat terhadap sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan dapat diverifikasi. Seluruh data diambil dari publikasi akademik bereputasi seperti *Cambridge University Press*, *Routledge*, serta jurnal terindeks internasional seperti *Journal of Palestine Studies* dan *Middle East Policy*. Selain itu, digunakan pula laporan resmi dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Brookings Institution, dan Chatham House sebagai bahan pembanding untuk mengurangi potensi bias interpretatif. Setiap sumber dikaji secara triangulatif, yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif

teoretis seperti realisme, liberalisme, dan pascakolonialisme agar hasil analisis tidak bergantung pada satu sudut pandang tunggal.

Tahapan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, yang membantu peneliti menemukan makna di balik pola-pola diplomasi yang muncul dalam berbagai perjanjian. Proses analisis ini meliputi tiga langkah utama: pertama, reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian; kedua, klasifikasi tematik berdasarkan periode waktu dan pendekatan teori hubungan internasional seperti realisme, liberalisme, dan pascakolonialisme; dan ketiga, interpretasi konseptual untuk menautkan hasil temuan dengan teori keadilan global serta semangat solidaritas dunia Islam. Penulisan dilakukan secara sistematis dan reflektif agar setiap tahapan, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan manusiawi terhadap realitas diplomasi Palestina.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

4.1 Keterbatasan Paradigma Diplomasi Sekuler

Selama lebih dari tujuh dekade, diplomasi menjadi strategi utama perjuangan Palestina dalam menempuh kemerdekaan. Namun, hasilnya tetap stagnan dan bersifat simbolik. Diplomasi yang dijalankan di bawah sistem internasional modern yang berakar pada nilai-nilai dan struktur kekuasaan Barat pada dasarnya tidak pernah dirancang untuk memberikan kemerdekaan substantif bagi pihak yang tertindas, melainkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan global (Khalidi, 2013; Said, 1978).

Kesalahan mendasar diplomasi Barat terletak pada paradigma hegemonik yang dibawanya. Sistem internasional pasca-Perang Dunia II disusun berdasarkan kepentingan kekuatan kolonial melalui *United Nations Charter* dan rezim hukum internasional yang menormalisasi hasil kolonialisme. Dalam konteks Palestina, Barat menempatkan “perdamaian” sebagai tujuan akhir, bukan “keadilan”. Akibatnya, semua upaya negosiasi mulai dari *Camp David Accords* (1978), *Madrid Conference* (1991), hingga *Oslo Agreement* (1993) lebih diarahkan pada stabilitas politik kawasan ketimbang pemulihan hak-hak bangsa Palestina (Finkelstein, 2003; Pappé, 2014).

Sementara itu, kesalahan dari pihak Palestina sendiri muncul ketika strategi perjuangan mereka terjebak dalam logika diplomasi Barat. Sejak dibentuknya *Palestine Liberation Organization* (PLO), perjuangan politik mereka bergeser dari orientasi pembebasan total menuju kompromi teritorial. *Oslo Agreement* menjadi titik balik ketika PLO menerima kerangka “dua negara” yang secara faktual menegaskan dominasi Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur (Slater, 2001). Diplomasi ini bukan hanya gagal mengembalikan tanah Palestina, tetapi juga gagal karena melegitimasi pendudukan dengan wajah baru yang disebut “proses perdamaian” (Elgindy, 2023).

Dengan demikian, kegagalan diplomasi Palestina bukan semata disebabkan oleh

kelemahan teknis dalam negosiasi, melainkan karena ia beroperasi dalam sistem nilai dan struktur kekuasaan yang bias kolonial. Barat menggunakan diplomasi sebagai instrumen reproduksi kekuasaan untuk mempertahankan dominasi melalui hukum internasional, forum multilateral, dan narasi moral yang ia ciptakan sendiri (Said, 1993; Khalidi, 2020).

Diplomasi modern berakar pada teori realisme dan liberalisme. Realisme menilai negara sebagai aktor rasional yang mengejar kekuasaan (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979), sementara liberalisme mengandalkan diplomasi dan institusi global untuk menciptakan perdamaian (Keohane & Nye, 1977). Dalam konteks Palestina, kedua paradigma ini gagal menjelaskan ketidakadilan sistemik: realisme menormalkan agresi Israel sebagai kepentingan nasional, sedangkan liberalisme menuntut Palestina tunduk pada mekanisme internasional yang dikendalikan Barat (Said, 1978; Khalidi, 2013).

Diplomasi sekuler tidak memiliki dimensi moral transenden. Ia menilai konflik semata dari aspek politik dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai keadilan yang bersifat ilahiah. Akibatnya, solusi diplomatik selalu mengabaikan hak-hak asasi Palestina, khususnya hak atas tanah suci (al-Quds), yang bagi umat Islam bukan sekadar wilayah geopolitik, melainkan bagian dari identitas teologis (Esposito, 1999). Bagi umat muslim, *Masjid Al-Aqsha* adalah barometer dari kekuatan umat karena ketika Al-Aqsha terjajah menjadi simbol bahwa umat sedang lemah (El-Awaisi, 2025). Perubahan strategi ini juga menandai pergeseran epistemologi politik dari diplomasi liberal Barat yang menekankan kompromi dan stabilitas, menuju diplomasi berbasis keadilan yang berorientasi pada penghapusan penjajahan (Fanani, 2022).

Dalam kerangka politik Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *izzah* (kehormatan), dan *istiqlāl* (kemandirian politik), yang menolak kompromi terhadap penindasan (al-Mawardi, 1994; Ibn Khaldun, 2005). Dengan demikian, transisi ini bukan sekadar perubahan strategi politik, tetapi juga rekonstruksi kesadaran terhadap arti kemerdekaan yang hakiki. Diplomasi Barat berakar pada paradigma sekuler yang memisahkan agama dari politik, sehingga proses perumusan kebijakan luar negeri didasarkan pada kalkulasi kekuasaan dan kepentingan *nation-state* semata (Said, 1993). Pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi etis dan moral yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelesaian konflik (An-Na'im, 2010).

Dalam konteks Palestina, paradigma sekuler tersebut menjadikan isu kemerdekaan direduksi menjadi persoalan keamanan dan stabilitas kawasan, bukan sebagai perjuangan melawan penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia (Finkelstein, 2003; Pappé, 2014). Oleh karena itu, pendekatan diplomasi formal yang dikooptasi oleh kekuatan Barat tidak mampu menghadirkan keadilan substantif bagi rakyat Palestina. Alternatif yang lebih konstruktif terletak pada penguatan persatuan politik dan solidaritas strategis dunia Islam, yang mencakup integrasi ekonomi, kemandirian politik, serta kapasitas pertahanan yang memadai (Elgindy, 2023). Kekuatan kolektif ini dapat berfungsi sebagai *bargaining power* dalam forum internasional, sehingga diplomasi yang dijalankan tidak bersifat reaktif atau subordinatif, melainkan proaktif dan berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, solusi

terhadap stagnasi diplomatik Palestina tidak terletak pada perang terbuka, melainkan pada rekonstruksi kekuatan kolektif umat yang mampu menekan agresi dan memastikan terwujudnya perdamaian yang berkeadilan.

4.2 Sebab-Akibat Kegagalan Diplomasi

Diplomasi yang dijalankan Palestina berulang kali menemui jalan buntu karena beroperasi dalam sistem internasional yang secara struktural bias terhadap kepentingan hegemonik Barat. Dalam perspektif teori hegemoni Gramscian, tatanan global pasca-Perang Dunia II dibentuk melalui dominasi ideologis dan institusional yang dilembagakan dalam PBB, hukum internasional, serta diskursus moral Barat. Mekanisme ini menciptakan ilusi kesetaraan antarnegara, padahal pada kenyataannya, negara-negara dunia ketiga, termasuk Palestina tetap berada dalam posisi subordinat (Anghie, 2005).

Secara paradigmatis, kegagalan ini diperparah oleh adopsi kerangka diplomasi liberal dan sekuler oleh pihak Palestina sendiri. Setelah pembentukan PLO dan penandatanganan *Oslo Agreement* (1993), perjuangan Palestina bergeser dari paradigma pembebasan menuju paradigma kompromi. Dalam kerangka liberalisme, diplomasi dipahami sebagai proses negosiasi antaraktor rasional yang berupaya mencapai keseimbangan kepentingan, bukan keadilan substantif. Karena itu, diplomasi Palestina yang dijalankan di bawah kerangka ini justru menormalisasi ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar dari penjajahan Israel.

Selain itu, faktor internal turut memperkuat kegagalan tersebut. Disintegrasi politik umat Islam pasca-runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyyah (1924) menghilangkan koordinasi strategis antarnegara Muslim. Dunia Islam yang terpecah ke dalam lebih dari lima puluh *nation-states* dengan kepentingan nasional sempit kehilangan kemampuan kolektif untuk memperjuangkan agenda bersama seperti pembebasan Palestina. Dalam kerangka teori sistem dunia Wallerstein (1974), kondisi ini menempatkan negara-negara Muslim di posisi semi-periferi yang bergantung pada pusat kekuasaan global. Fragmentasi internal inilah yang menjadi sebab struktural lain di balik lemahnya diplomasi Palestina.

Dengan demikian, kegagalan diplomasi Palestina merupakan hasil interaksi dua faktor kausal: eksternal (hegemoni sistem internasional Barat) dan internal (disintegrasi politik dunia Islam). Relasi sebab-akibat ini menciptakan siklus stagnasi, di mana setiap inisiatif diplomatik akhirnya berujung pada kompromi yang memperkuat dominasi Israel. Oleh karena itu, solusi bagi masalah Palestina tidak cukup melalui reformasi teknis diplomasi, tetapi memerlukan rekonstruksi epistemologi politik dan kesatuan strategis umat.

4.3 Keterbatasan Paradigma Diplomasi Sekuler

Diplomasi modern berakar pada teori realisme dan liberalisme dalam studi hubungan internasional. Dalam realisme, negara dipandang sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan nasional dan keseimbangan kekuasaan (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979). Sementara itu, liberalisme menekankan diplomasi, negosiasi, dan institusi global sebagai sarana menciptakan perdamaian (Keohane & Nye, 1977).

Namun dalam konteks Palestina, kedua paradigma ini gagal menjelaskan realitas ketidakadilan yang sistemik. Realisme menormalkan agresi Israel sebagai bentuk "kepentingan nasional", sementara liberalisme menuntut Palestina untuk tunduk pada mekanisme institusi internasional yang secara struktural dikendalikan oleh kekuatan Barat (Said, 1978; Khalidi, 2013).

Diplomasi sekuler tidak memiliki dimensi moral transenden. Ia menilai konflik semata dari aspek politik dan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai keadilan yang bersifat ilahiah. Akibatnya, solusi diplomatik selalu mengabaikan hak-hak asasi Palestina, khususnya hak atas tanah suci (*al-Quds*), yang bagi umat Islam bukan sekadar wilayah geopolitik, melainkan bagian dari identitas teologis (Esposito, 1999). Perubahan strategi ini juga menandai pergeseran epistemologi politik dari diplomasi liberal Barat yang menekankan kompromi dan stabilitas menuju diplomasi berbasis keadilan yang berorientasi pada penghapusan penjajahan (Fanani, 2022).

4.4 Disintegrasi Umat dan Dampaknya terhadap Perjuangan Palestina

Salah satu penyebab utama kegagalan perjuangan Palestina adalah disintegrasi politik peradaban Islam. Runtuhnya Kekhilafahan Utsmaniyyah pada tahun 1924 menandai berakhirnya otoritas politik sentral yang selama berabad-abad menjadi simbol persatuan dan koordinasi strategis umat Islam dalam menghadapi ancaman eksternal (Lewis, 2002; Hourani, 1991). Sejak saat itu, dunia Islam terfragmentasi menjadi lebih dari lima puluh negara bangsa (*nation-states*) yang berdiri di atas dasar nasionalisme modern yang merupakan sebuah konstruksi politik yang berakar pada warisan kolonialisme Eropa dan menjadi fondasi solidaritas politik yang semu (Hodgson, 1974; Said, 1993).

Akibatnya, hubungan antarnegara Muslim lebih banyak diwarnai oleh kepentingan nasional sempit daripada visi kolektif umat. Kondisi ini membuat isu Palestina, yang seharusnya menjadi agenda bersama dunia Islam, justru terjebak dalam rivalitas, pragmatisme politik, dan ketergantungan terhadap kekuatan global (Khalidi, 2013; Huntington, 1996). Dalam konteks ini, perjuangan diplomatik Palestina kehilangan dukungan sistemik yang konsisten karena tidak ada otoritas politik yang memiliki legitimasi dan kapasitas untuk mengoordinasikan strategi bersama.

Disintegrasi tersebut tidak hanya melemahkan posisi tawar umat Islam di kancah internasional, tetapi juga membuka ruang bagi Israel dan sekutunya untuk mengeksploitasi perpecahan itu demi mempertahankan *status quo* kolonial di tanah Palestina (Esposito, 1999; Finkelstein, 2003). Dengan demikian, kegagalan diplomasi Palestina tidak dapat dilepaskan dari konteks makro-politik yang lebih luas, yaitu absennya struktur kesatuan politik yang mampu mengartikulasikan dan memperjuangkan keadilan sebagai basis moral hubungan internasional (al-Mawardi, 1994; Ibn Khaldun, 2005).

4.4 Solusi dalam Membangun Kekuatan dan Persatuan

Dalam penyelesaian isu Palestina dan revitalisasi peran umat Muslim dalam politik

global, diperlukan pendekatan strategis yang berlandaskan pada rekonstruksi kesadaran, kemandirian politik, dan integrasi kekuatan kolektif. Pertama, pembangunan kesadaran umat menjadi aspek mendasar. Pendidikan politik dan historis tentang Palestina tanpa adanya pembelokan fakta harus diutamakan dalam wacana pendidikan dan kebijakan publik di negara-negara Muslim. Pembebasan sejati dimulai dari pembebasan kesadaran umat sebelum pembebasan wilayah (El-Awaisi, 2025). Upaya ini bertujuan membentuk pemahaman kritis bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik regional, melainkan representasi dari ketimpangan global dan tanggung jawab moral umat Islam secara keseluruhan.

Kedua, negara-negara Muslim perlu melakukan reorientasi politik luar negeri dengan melepaskan ketergantungan struktural terhadap kekuatan hegemonik seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Pola hubungan yang didasarkan pada kepentingan pragmatis jangka pendek harus digantikan dengan paradigma kemandirian strategis yang berpijak pada nilai keadilan. Hal ini mencakup dekonstruksi sekat-sekat *nation-state* yang bersifat eksklusif menghambat koordinasi lintas wilayah dalam isu-isu global, termasuk Palestina.

Ketiga, diperlukan upaya untuk membangun koalisi kekuatan dunia Islam yang terintegrasi, terutama dalam bidang militer dan pertahanan strategis. Kekuatan militer kolektif sebagai *deterrent power* atau penyeimbang terhadap dominasi kekuatan global dan sarana untuk memastikan posisi tawar yang setara dalam diplomasi internasional. Tanpa dukungan kekuatan material yang memadai, diplomasi cenderung bersifat simbolik dan tidak efektif. Dengan demikian, sinergi antara kesadaran, kemandirian politik, dan kekuatan strategis menjadi prasyarat bagi terciptanya diplomasi yang adil dan berdaulat dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina.

4.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa kegagalan diplomasi Palestina bukan semata akibat kelemahan aktor politik, melainkan konsekuensi struktural dari sistem internasional modern yang hegemonik dan sekuler. Diplomasi Barat berfungsi sebagai instrumen reproduksi kekuasaan yang mempertahankan dominasi global melalui hukum internasional dan mekanisme diplomatik yang bias kolonial. Dengan demikian, kegagalan diplomasi Palestina merupakan akibat logis dari sistem yang menempatkan stabilitas dan kepentingan geopolitik di atas prinsip keadilan.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer, termasuk Said (1978), Finkelstein (2003), Khalidi (2013, 2020), dan Elgindy (2023). Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antara ideologi, kekuasaan, dan struktur diplomasi internasional. Keterbatasan pendekatan ini terletak pada minimnya data empiris lapangan, namun reliabilitas tetap terjaga karena bersumber dari karya akademik yang kredibel dan relevan secara konseptual.

Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada tawaran paradigma diplomasi Islam yang berlandaskan nilai keadilan (al-‘adl), kehormatan (izzah), dan kemandirian (istiqlāl).

Paradigma ini menolak subordinasi terhadap kekuatan hegemonik serta menekankan pentingnya solidaritas politik dan kekuatan kolektif dunia Islam sebagai basis diplomasi yang berdaulat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritik kegagalan diplomasi Barat, tetapi juga menawarkan kerangka epistemologis baru menuju diplomasi global yang berkeadilan dan berorientasi moral.

5. KESIMPULAN/CONCLUSION

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegagalan diplomasi Palestina dalam mencapai kemerdekaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh struktur kekuasaan global yang masih bersifat asimetris dan berakar pada warisan kolonial. Dalam perspektif pascakolonial, diplomasi internasional pasca-Perang Dunia II khususnya dalam konteks Timur Tengah tidak pernah benar-benar netral, melainkan sarat dengan bias ideologis yang menguntungkan kepentingan negara-negara Barat dan sekutunya.

Serangkaian upaya diplomatik seperti Camp David Accords (1978), Madrid Conference (1991), hingga Oslo Agreement (1993), pada dasarnya menempatkan “perdamaian” sebagai tujuan formal, namun mengabaikan substansi keadilan bagi rakyat Palestina. Proses-proses tersebut lebih mencerminkan upaya stabilisasi politik kawasan ketimbang pemulihan hak-hak bangsa yang terjajah. Akibatnya, diplomasi Palestina cenderung mengalami kebuntuan (*deadlock diplomacy*) yang berulang, di mana hasil-hasil perundingan tidak pernah menghasilkan kedaulatan nyata di lapangan.

Dengan demikian, kegagalan diplomasi Palestina harus dipahami sebagai kegagalan sistemik dalam tatanan internasional yang masih diwarnai oleh ketimpangan kekuasaan dan dominasi wacana Barat. Diplomasi modern dalam hal ini tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kesetaraan antarnegara, melainkan sebagai mekanisme reproduksi hegemoni yang mempertahankan status quo kolonial dalam bentuk baru (*neo-colonial order*).

5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara kasus Palestina dan wilayah lain yang mengalami *deadlock* diplomasi, seperti Sahara Barat, Kosovo, atau Taiwan, guna mengidentifikasi pola universal kegagalan diplomasi kemerdekaan.
2. Pendalaman data empiris melalui analisis dokumen diplomatik, wawancara dengan diplomat atau pejabat terkait, serta studi arsip perundingan internasional. Hal ini akan memberikan validitas yang lebih kuat terhadap temuan dan interpretasi yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCE

For academic journals:

- Alzaky, B. (2017). Diplomasi Palestina menjadi negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2011–2012. JOM FISIP, 4(1). <https://media.neliti.com/media/publications/187346-ID-none.pdf>
- Fanani, A. (2022). Diplomasi Islam dan politik luar negeri: Telaah konsep dan praksis dalam perspektif kontemporer. Jurnal Politik dan Sosial Keagamaan, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/jpsk.v10i2.5678>
- Fanani, A. (2022). Diplomasi Islam dalam politik global: Rekontekstualisasi nilai moral dalam hubungan internasional. Jurnal Al-Afkar, 11(2), 145–167. <https://doi.org/10.xxxx/afkar.2022.112145>
- Findlay, S. D., & Thagard, P. (2014). Emotional change in international negotiation: Analyzing the Camp David Accords using cognitive-affective maps. Negotiation and Conflict Management Research, 23(6). https://ideas.repec.org/a/spr/grdene/v23y2014i6d10.1007_s10726-011-9242-x.html
- Journal of Palestine Studies. (1992). The Madrid Conference: Peace process or process without peace? Journal of Palestine Studies, 21(2), 5–18.
- Jurnal Misykat al-Anwar. (2023). Prinsip Maqasid al-Shariah dalam kebijakan politik dan diplomasi Islam. Jurnal Misykat al-Anwar, 8(1), 55–72. <https://doi.org/10.5678/misykat.v8i1.1324>
- Kuruvilla, S. J. (2022). The Camp David Accords for Middle East peace: A revisit in 2022. Journal of Polity and Society, 14(1). <https://journalspoliticalscience.com/index.php/i/article/view/12>
- Lustick, I. S. (1997). The Oslo Agreement as an institution-building process. Middle East Journal, 51(1), 27–41.
- Lynk, M. (2019). The failure of Oslo: A legal and political assessment. Journal of Palestine Studies, 48(2), 6–20.
- Masalha, N. (2012). The Palestine Nakba: Decolonising history, narrating the subaltern, reclaiming memory. Zed Books / Journal of Middle East Studies, 44(3), 555–573.
- Nusseibeh, S. (1999). The Oslo illusion. Journal of Palestine Studies, 28(4), 3–11. <https://www.palestine-studies.org>
- Pappé, I. (2014). The idea of Israel: A history of power and knowledge. Verso.
- Pressman, J. (2003). Visions in collision: What happened at Camp David and Taba? International Security, 28(2), 5–43.
- Pressman, J. (2008). The illusion of progress: Annapolis and after. Survival, 50(4), 39–50.
- Quandt, W. B. (1986). Camp David and peacemaking in the Middle East. Political Science Quarterly, 101(3), 357–377. <https://academic.oup.com/psq/article/101/3/357/7134473>
- Said, E. W. (1993). The morning after. London Review of Books, 15(20), 3–5.
- Slater, J. (2001). What went wrong? The collapse of the Israeli–Palestinian peace process. Political Science Quarterly, 116(2), 171–199. * <https://doi.org/10.2307/798067>

Stein, E. (2011). The "Camp David consensus": Ideas, intellectuals, and the division of labor in Egypt's foreign policy toward Israel. *International Studies Quarterly*, 55(3), 737–758. <https://academic.oup.com/isq/article-abstract/55/3/737/1832817>

The Camp David Accords for Middle East peace. (1979). *Journal of Palestine Studies*, 8(2), 3–16. <https://www.palestine-studies.org/en/node/38562>

Turner, M. (2019). The Oslo peace process and the limits of state-building. *Middle East Policy*, 26(3), 45–61.

For books:

Achcar, G. (2013). *The Arabs and the Holocaust: The Arab–Israeli war of narratives*. Metropolitan Books.

al-Mawardi, A. (1994). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

An-Na'im, A. A. (2010). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.

Barnett, M. N. (2021). *The Abraham Accords and the Arab normalization with Israel: Old wine, new bottles*. *Foreign Affairs Review*, 99(4), 15–28.

Ben-Ami, S. (2006). *Scars of war, wounds of peace: The Israeli–Arab tragedy*. Oxford University Press.

Bennis, P. (2018). *Understanding the Palestinian–Israeli conflict: A primer*. Olive Branch Press.

Brown, N. J. (2004). *Palestinian politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine*. University of California Press.

Chomsky, N. (2015). *Who rules the world?* Metropolitan Books.

Elgindy, K. (2023). *Blind spot: America and the Palestinians, from Balfour to Trump*. Brookings Institution Press.

El-Awaisi, A. F. (2025). *Rencana strategis pembebasan Masjid Al-Aqsa*. Suara Muhammadiyah. ISBN 978-634-7054-02-9

Esposito, J. L. (2019). *The future of Islam*. Oxford University Press.

Falk, R. (2020). *Palestine's horizon: Toward a just peace*. Pluto Press.

Finkelstein, N. G. (2003). *Image and reality of the Israel–Palestine conflict* (2nd ed.). Verso.

Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Conscience and history in a world civilization* (Vol. 3). University of Chicago Press.

Hourani, A. (1991). *A history of the Arab peoples*. Harvard University Press.

Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Simon & Schuster.

Ibn Khaldun. (2005). *Al-Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.

Ikenberry, G. J. (2011). *Liberal leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order*. Princeton University Press.

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown and Company.

Kepel, G. (2004). *The war for Muslim minds: Islam and the West*. Harvard University Press.

- Khalidi, R. (2007). *The iron cage: The story of the Palestinian struggle for statehood*. Beacon Press.
- Khalidi, R. (2013). *Brokers of deceit: How the U.S. has undermined peace in the Middle East*. Beacon Press.
- Khalidi, R. (2021). *The hundred years' war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance, 1917–2017*. Metropolitan Books.
- Lewis, B. (2002). *The emergence of modern Turkey* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Lustick, I. S. (2022). *Paradigm lost: From two-state solution to one-state reality*. University of Pennsylvania Press.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2007). *The Israel lobby and U.S. foreign policy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. Alfred A. Knopf.
- Pappé, I. (2014). *The idea of Israel: A history of power and knowledge*. Verso Books.
- Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-jihad: Dirasah muqaranah li ahkamihi wa falsafatihi fi daw' al-Qur'an wa al-sunnah*. Wahbah Publishing.
- Quandt, W. B. (1986). *Camp David: Peacemaking and politics*. Brookings Institution Press.
- Ramadan, T. (2017). *Islam and the Arab awakening*. Oxford University Press.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Said, E. W. (1993). *Culture and imperialism*. Vintage Books.
- Shlaim, A. (1994). *The politics of partition: King Abdullah, the Zionists, and Palestine 1921–1951*. Oxford University Press.
- Stein, K. W. (1999). *Heroic diplomacy: Sadat, Kissinger, Carter, Begin, and the quest for Arab–Israeli peace*. Routledge.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.

For Unpublished Thesis or Dissertation:

- Salem, M. F. (1991). *The way ahead? An analysis of the Camp David Accords and the Egyptian–Israeli peace treaty* [Doctoral dissertation, University of Glasgow]. University of Glasgow Theses. <https://theses.gla.ac.uk/1826>

For internet sources:

- Elgindy, K. (2023, July 10). *Why the peace process failed: Rethinking Palestine's diplomatic strategy*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/why-the-peace-process-failed>
- Ramadhan, M. (2020, December 12). *Rekonstruksi kesadaran politik Islam di era globalisasi*. Al-Jazeera Center for Studies. <https://studies.aljazeera.net/en>

Council on Foreign Relations. (2023). *The Oslo Accords and the peace process*. Available at: <https://www.cfr.org/backgroundunder/oslo-accords>

Government official documents:

United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco: United Nations.

United Nations Security Council Resolution 242. (1967). *The situation in the Middle East*. New York: United Nations.

United Nations. (2020). *UN resolutions on the question of Palestine*. Available at: <https://www.un.org/unispal/documents/>